

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT (PUGAR) DI KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

¹ Syahri Ramadoan, ² Firman, ³ Chaerunas

¹²³Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Email : Chaerunnas20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui implementasi program PUGaR di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskripsif. Penentuan informan penelitian ditetapkan dengan cara menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Observasi, Wawancara dan Dokumnetasi. Berdasarkan hasil penelitian 1). Sasaran dan standar program sudah tepat sesuai dengan pedoman teknis PUGaR tahun 2020 yaitu kelompok tani garam yang mempunyai luas lahan tambak minimal 15 Ha; 2) Sumber daya implementasi sudah cukup memadai, dimana implementor sudah terlatih dan jumlah dana cukup memadai; 3) Komunikasi badan pelaksana yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai implementor dengan pihak yang terkait dalam program PUGaR berjalan dengan baik; 4) Karakteristik badan pelaksana, implementor selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sesama agen pelaksana yaitu Camat, KUPTD Kelautan dan Perikanan Kecamatan, Kepala Desa, Tenaga Teknis Program dan Penyuluh Kelautan dan Perikanan Kecamatan; 5) Disposisi Implementor sangat respositif dan demokratis terhadap petambak garam; 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik mempengaruhi implementasi program PUGaR di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2020.

Kata Kunci : Implementasi, Program PUGaR

LATAR BELAKANG

Indonesia ialah suatu negara kepulauan, yang mempunyai panjang garis pantai yaitu sepanjang 99.093 km. Dan merupakan urutan kedua yang mempunyai garis pantai terpanjang setelah Kanada. Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan daerah yang memiliki iklim tropis. Dimana dengan letaknya yang berada di daerah iklim tropis, menjadikan Negara Indonesia

memiliki potensi untuk memproduksi garam.

Garam ialah salah satu komoditas yang dijadikan pelengkap dalam kebutuhan konsumsi dan merupakan salah satu sumber elektrolit untuk badan manusia. Disamping itu juga garam dijadikan bahan baku tambahan untuk memproduksi berbagai macam kepentingan industri, antara lain: industri di bidang kecantikan, dibidang tekstil,

dibidang kesehatan, dipengeboran minyak dan dibidang industry produksi olahan makanan.

Di Indonesia pemasaran garam rakyat pada kalangan industri memiliki banyak persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah mengacu pada kualitas garam. Dimana kualitas garam yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan untuk industri adalah yang memiliki kadar *Natrium Clorida*-nya di atas 97%, dan kandungan airnya kurang dari 0,5%. Sebaliknya garam yang banyak diproduksi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki kadar NaCl-nya kurang dari 94%, dan kadar airnya sekitar 5%. Selama produksi garam nasional kualitasnya belum memenuhi kebutuhan garam nasional, maka import garam di Indonesia akan terus terjadi setiap tahun.

Guna meningkatkan kesejahteraan dan untuk mendukung perkembangan ekonomi petambak garam, maka pada tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi sebuah program yaitu pengembangan usaha garam rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan PUGaR. Program PUGaR merupakan suatu program nasional yang peruntukkan untuk peningkatan peluang kerja dan kemakmuran petambak garam rakyat lainnya dalam upaya mendukung swasembada garam nasional, baik garam untuk pangan maupun garam industri.

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah potensial penghasil garam yang berada diluar pulau Jawa. Wilayah daerah kabupaten yang termasuk produsen garam yang berada di Nusa Tenggara Barat meliputi lima kabupaten

yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Kabupaten Bima sebagai salah satu sentra garam di NTB dengan panjang garis pantai adalah 446 Km dan potensi lahan yang cukup luas yaitu 4.675 Ha. Luas lahan yang baru dimanfaatkannya untuk proses produksi garam yaitu seluas 1.778,02 Ha atau sekitar 38,03 %, dimana produksi garam rata - rata setiap tahunnya sebesar 110.000 ton/tahun. Ditambah lagi dengan kondisi iklim di Kabupaten Bima dengan musim panas rata-rata enam sampai tujuh bulan dalam setahun dengan suhu permukaan rata-rata 31°c – 33°c, dan memiliki air laut yang salinitas awal rata-rata 50 – 80 ppt, ini merupakan salah satu potensi yang sangat baik untuk mengembangkan usaha tambak garam.

Rendahnya pendapatan petambak garam dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: sebagian besar petambak garam masih merupakan petambak garam tradisional, mereka memiliki berbagai keterbatasan antara lain pengetahuan/ keterampilan, akses permodalan dan pasar. Selain itu masalah lahan juga menjadi penghambat dalam pengembangan usaha garam seperti lahan yang digunakan untuk tambak garam adalah merupakan lahan yang dipakai juga untuk budidaya bandeng selain itu kepemilikan lahan masih bersifat pribadi sehingga dibutuhkan musyawarah dalam melakukan pemetaan. Dan yang paling diutamakan ialah kualitas garam hasil produksi petambak garam masih sulit menyentuh standar pasar atau pabrik.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petambak garam, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan upaya meningkatkan produksi garam melalui program PUGaR. Dalam memproduksi garam, petambak garam

diharapkan menghasilkan garam yang berkualitas sehingga dapat diterima sebagai garam industri. Adapun capaian program PUGaR Kabupaten Bima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bisa dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini.

Tabel 1.2. Capaian Produksi Program PUGaR di Kabupaten Bima Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

No	Tahun	Integrasi Lahan PUGaR (Ha)	Total Produksi Garam (Ton)	Realisasi Produksi Garam (%)		
				KP 1	KP 2	KP 3
1	2015	-	152.739	0	60	40
2	2016	5	13.753	1	70	29
3	2017	20	92.537	5	70	25
4	2018	184	139.102	15	80	5
5	2019	207	140.075	17	79	4
6	2020	17	138.413	18	79	3
Jumlah		433				

Sumber Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, 2020

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hasil garam yang didapatkan oleh petambak garam yang ada di Kabupaten Bima belum ada peningkatan produksi yang signifikan. Total produksi garam pada tahun 2015 adalah sebanyak 152.739 ton. Namun realisasi produksi garam yang dihasilkan berupa garam dengan kualitas produksi nomor 2 dan 3 (KP 2 dan KP 3). Dimana pada tahun 2015, sistem integrasi lahan PUGaR belum memiliki lahan atau 0 Ha.

Sedangkan pada tahun 2020, hasil garam yang didapatkan mencapai 138.413 ton, dengan luas lahan integrasi sebesar 17 Ha. Dan untuk realisasi produksi garam untuk kualitas 1 sekitar 18% dan KP 2 79 % serta KP 3 hanya 3% mengalami kenaikan. Namun total produksi garam ditahun 2020 mengalami

penurunan, walaupun dengan adanya integrasi lahan PUGaR.

Dari 13 kecamatan pesisir di Kabupaten Bima, hanya 5 kecamatan saja yang menjadi sentra produksi garam yaitu Kecamatan Bolo, Kecamatan Woha, Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu dan Kecamatan Palibelo. Kecamatan Palibelo merupakan salah satu kecamatan yang menjadi sentra produksi garam Kabupaten Bima berada di Desa Belo dengan luas lahan potensi tambak adalah 791,00 Ha. Sementara luas lahan yang baru dikelola untuk program PUGaR adalah sebesar 86,39 Ha.

Lahan tambak yang terdapat di Desa Belo masih status kepemilikannya adalah sewa dan cenderung terpisah-pisah atau terfragmentasi. Dengan posisi lahan yang terpisah-pisah,

mengakibatkan produktifitas garam menurun sehingga akses sarana dan prasarana yang kelokasi areal petambak garam kurang. Hal ini akan berdampak terhadap rendahnya penghasilan masyarakat di Desa Belo.

Petambak yang ada di Kecamatan Palibelo khususnya Desa Belo dalam melakukan usaha penggaraman cenderung berusaha secara individual dan masih kurangnya pemahaman tentang pembentukan suatu kelompok atau koperasi. Desa Belo belum memiliki badan hukum yang berupaya dalam pendistribusian dan menjalin kemitraan dengan industri garam sehingga dalam memasarkan garam hasil produksi rakyat dapat dilakukan secara berlanjut.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa masalah dalam menghasilkan suatu garam bermutu, sehingga perlu

ditinjau bentuk dari pelaksanaan program PUGaR di Kabupaten Bima. Karena program ini bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendukung terwujudnya swasembada garam nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian kejadian secara sistematis dan akurat. Teknik Penentuan Informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik purposive sampling, oleh karena itu informan dalam penelitian ini yaitu :

No	Uraian	Jumlah (orang)
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima	1
2	Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima	1
3	Camat Palibelo	1
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Palibelo	1
4	Kepala Desa Belo	1
5	Tenaga Pendamping Teknik Program PUGaR	1
6	Penyuluh Perikanan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima	1
7	Pemilik Tambak di Desa Belo Kecamatan Palibelo	4
Jumlah		11

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis

data dalam penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif terdiri atas

pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program PUGaR dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yang disebut *A Model Of The Policy Implementation*.

1. Sasaran dan Standar Program

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari sasaran dan standar program. Suatu kebijakan agar dapat terimplementasi dengan baik harus memiliki standar dan sasaran yang jelas. Dengan adanya standar dan sasaran yang jelas dapat memudahkan implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Standar dan sasaran program mengacu pada serangkaian kegiatan dalam program PUGaR dari proses awal sampai akhir, apakah kegiatan telah sesuai dengan standar dan sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa kelompok petani yang bergabung dalam program pugar harus mempunyai lahan minimal 15 Ha. Guna untuk mengidentifikasi, seleksi dan verifikasi lokasi lahan tambak, petani menyerahkan KTP beserta SPPT tambak. Untuk mencapai sasaran dan standart program PUGaR telah dilakukan

perencanaan dan sosialisasi tentang Program PUGaR yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat yang dihasilkan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan petambak garam. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung di Kantor Desa Belo oleh Tim Teknis Program PUGaR dan Tenaga Pendamping Program PUGaR yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, KUPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Palibelo dan Penyuluh Perikanan dan Kelautan Kecamatan Palibelo serta anggota Kelompok PUGaR. Berdasarkan pada sosialisasi yang dilakukan keterlibatan kelompok sasaran dalam pelaksanaan PUGaR Kecamatan Palibelo sudah cukup baik dalam perencanaan dan sosialisasi Program PUGaR Bersama dengan para Stakeholder. Dengan memperhatikan alur sasaran dan standar program PUGaR maka dapat ditarik kesimpulan bahwa serangkaian kegiatan dalam perencanaan dan sosialisasi program sebagai bentuk penguatan sasaran dan standar program PUGaR telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis program PUGaR.

2. Sumber Daya Implementasi

Dalam suatu implementasi kebijakan yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena mereka selaku

implemator yang dapat mensukseskan ataupun menggagalkan pelaksanaan sebuah kebijakan mereka harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau dengan yang telah ditetapkan oleh dinas yang berkaitan. Ada dua sumber daya dalam pelaksanaan suatu program yaitu sumber daya implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya implementor mengacu pada kemampuan dan kualitas implementor yang melingkupi target groups. Sedangkan, sumber daya finansial mengacu pada dana yang membiaya pelaksanaan suatu program.

Pihak-pihak yang terlibat dalam program PUGaR di Desa Belo yaitu pihak Desa Belo yang terdiri dari Kepala Desa Belo dan kelompok petambak garam So Doro Kola II, dan pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Bima yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten yang terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Bidang Kelembagaan dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tenaga Pendamping Program PUGaR.

Terkait dengan indikator sumber daya implementasi dapat diketahui bahwa dari segi sumber daya implementor dalam

pelaksanaan program PUGaR di Desa Belo Kecamatan Palibelo cukup memadai karena implementor Program PUGaR merupakan lulusan Sarjana Perikanan disamping itu implementor telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai Program PUGaR yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2019 di Surabaya. Pelatihan teknis lainnya telah dilaksanakan di aula Kalaki pada tahun 2019 dengan pemateri dari Balai Budidaya Ikan Banyuwangi yang diikuti oleh anggota kelompok PUGaR yang ada di Kabupaten Bima.

Kemampuan implementor dalam program PUGaR juga dapat dilihat bagaimana implementor mengatasi kendala dalam menyampaikan dan mengarahkan program PUGaR yang mana pendidikan dari anggota kelompok kebanyakan hanya lulusan SD dan SMA. Implementor dalam melakukan pendampingan teknis dituntut untuk bersabar dan berinovasi dalam menyampaikan materi, hal tersebut dikarenakan petani garam cenderung mempertahankan cara lama bertani garam yang diperoleh dari pengalaman mereka. Contohnya dalam pengambilan air tua yang secara teknis dilakukan pada umur air telah lebih dari 7 hari, namun oleh petambak hanya 3 hari, sehingga

kualitas garam yang diharapkan bagus akhirnya kurang dan dihargai sangat rendah.

Dari segi, sumber daya finansial dalam program PUGaR tahun 2020 telah memberikan bantuan berupa mesin pompa air, saluran irigasi yang meliputi pipa air, *bosem* atau bak penampung air, *plastik geoisolator*, jalan produksi dan gudang garam rakyat. Ketepatan penggunaan anggaran PUGaR sudah tepat, yang dibuktikan telah dibuatkan jalan produksi, gudang garam rakyat, saluran irigasi dan pemberian mesin pompa untuk mengambil air laut serta pemasangan *plastik geoisolator*. Untuk kekuatan dana program PUGaR dinilai cukup untuk menyediakan sarana dan prasarana usaha garam rakyat.

Seperti yang diketahui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa: “Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah penting dengan komunikasi. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

3. Komunikasi Badan Pelaksana

Dalam berbagai program implementasi kebijakan, sebuah realitas dari program kebijakan

perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dengan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Hubungan implementor program PUGaR dengan pihak yang terkait dengan program, antara lain: Camat Kecamatan Palibelo, pihak desa yang terdiri dari Kepala Desa Belo dan anggota Kelompok PUGaR So Doro Kola II sangat baik.

Cara yang dilakukan untuk membina komunikasi tersebut yaitu melalui sosialisasi langsung kepada petambak garam, pertemuan desa, dan *sharing* yang dilakukan di balai Desa Belo, salah satu tambak anggota kelompok So Doro Kola II, rumah kepala Desa Belo, dan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima. Dalam melakukan komunikasi tersebut tim teknis selaku implementator selalu didampingi oleh penyuluh perikanan dan Kepala UPT Dinas kelautan dan Perikanan Kecamatan Palibelo.

Informasi yang diperoleh dari informan di ketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai implementor dengan pihak yang terkait dengan program PUGaR berjalan dengan baik. Dengan komunikasi yang baik akan membangun koordinasi yang baik pula sehingga dalam implementasi suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik pula.

Dan dalam penyampaian informasi pun dapat disampaikan dengan jelas dan konsisten.

Kegiatan tersebut tergambar dari adanya kegiatan sosialisasi program PUGaR tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di aul Kalaki yang ikuti oleh ketua dan anggota kelompok PUGaR se Kabupaten Bima yang diwakili masing-masing 3 orang perkelompok, camat, kepala desa, UPTD Kelautan dan Perikanan, Penyuluh Perikanan Kecamatan yang mendapatkan program PUGaR, serta Tenaga Pendamping Teknis Program PUGaR yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kopeasi, Kepala Dinas Perindag, Kepala Bappeda, Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Kabupaten Bima.

Partisipasi petani garam dalam melaksanakan PUGaR dimulai dari perencanaan, Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGaR) ikut hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh dinas. Kegiatan tersebut sesuai dengan teori Van Horn dan Van Meter mengatakan bahwa: “apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman

terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi kebijakan sulit untuk dicapai”.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar tercapai keberhasilan yang maksimal harus mengetahui karakteristik dari agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Keberhasilan implementasi suatu program juga dipengaruhi oleh agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari struktur birokrasi yang mencakup 2 (dua) hal yaitu mekanisme yang berkaitan dengan SOP (*Standar Operating Procedure*) dan struktur organisasi pelaksana.

Dari pernyataan informan terkait struktur dan agen pelaksana diketahui bahwa dalam sebuah keputusan, para agen pelaksana selalu melakukan koordinasi dan konsultasi sesama

agen pelaksana. Informasi yang diterima pun tidak pernah bersifat rancu karena selalu ditinjau secepat mungkin, sedangkan hambatan dari komunikasi dapat diatasi dengan cara mencari waktu yang tepat untuk pertemuan. Kegiatan Program PUGaR tahun 2020, sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang terdapat pada buku petunjuk teknis program PUGaR. Pertemuan petani garam dengan agen pelaksana sudah berjalan dengan efektif dan efisien diikuti berbagai pelaksana kebijakan.

Dari uraian terkait fenomena struktur dan agen pelaksana yang telah diuraikan sesuai dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn mengatakan “implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh orang-orang atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang ditujukan untuk terwujudnya tujuan-tujuan yang sudah disepakati dalam sebuah putusan bijaksana”. Dengan adanya struktur agen pelaksana dapat memudahkan dalam pengambilan kebijakan, karena semua agen pelaksana selalu melakukan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan struktur organisasi dalam hal ini struktur organisasi pelaksana kegiatan PUGaR pada tahun berjalan.

5. Disposisi Implementor

Sikap implementor program PUGaR terhadap *target groups* adalah selalu menempatkan Kelompok Usaha garam (KUGAR) selaku *target groups* sebagai sasaran utama dalam segala kegiatan program PUGaR. Antusias anggota kelompok dalam menerima program PUGaR, hal ini dikarenakan dari sikap yang dimiliki oleh implementor yang sangat terbuka dan demokrasi membuat anggota kelompok semangat untuk meningkatkan produksi garam mereka sesuai dengan standar dari program PUGaR tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap informan diketahui Dinas Kelautan dan Perikanan sangat intensif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dengan mendatangkan ahli/insiyur terkait garam dan mengikut sertakan perwakilan dari kelompok untuk melakukan studi banding ke Madura guna melihat dan bertanya secara langsung proses pembuatan garam semi intensif. Fenomena menarik lainnya yaitu sikap anggota kelompok sangat terbuka dengan adanya program PUGaR ini, hal ini tersebut ditandai dengan keterbukaan masyarakat dalam menerima pengetahuan baru hasil dari studi banding dan pelatihan. Walaupun ada sekelompok masyarakat yang tidak mau menerima, tetapi dengan sikap resposif dan demokratis, akhirnya

masalah dapat terselesaikan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik”.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana keterlibatan lingkungan luar ikut terlibat dalam kebijakan publik. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mengharuskan kondisi lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang kondusif. Suatu kebijakan itu ada karena adanya tuntutan dari lingkungan. Untuk mengetahui dukungan lingkungan politik, sosial dan ekonomi terhadap implementasi kebijakan program PUGaR, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Dari hasil wawancara terkait indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat dilihat bahwa pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses implementasi program PUGaR di Kecamatan Palibelo. Dibuktikan dengan antusiasnya anggota dalam mendukung implementasi program PUGaR tahun 2020.

Walaupun ada beberapa pengaruh politik, namun dapat cepat terselesaikannya dengan adanya sosialisasi, musyawarah dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang tergabung dalam organisasi pelaksana program PUGaR tahun 2020.

Antusias anggota kelompok ini tidak terlepas dari usaha para implementor kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat. Hal ini juga membuktikan bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat berhubungan dengan komunikasi dan sumber daya manusia.

Dapat disimpulkan bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat dilihat dari salah satu variabel saja, melainkan harus juga dilihat dari variabel yang lainnya. Dan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sehingga apabila ada satu saja variabel yang tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi pelaksanaan variabel yang lain.

Hasil analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa model implementasi program PUGaR di Kecamatan Palibelo, sesuai dengan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikenal dengan istilah *A Model of the Policy*

Implementation. Dimana proses implementasi ini adalah sebuah abstraksi suatu pengejawantahan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable.

KESIMPULAN

1). Standar dan sasaran program, berdasarkan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan keterlibatan kelompok sasaran dalam melaksanakan program PUGaR di Kecamatan Palibelo sudah cukup baik, baik dalam kegiatan dalam perencanaan dan sosialisasi Program PUGaR yang dilaksanakan dengan para stakeholder. 2) Sumber daya implementasi, sumber daya implementor dalam pelaksanaan program PUGaR di Desa Belo Kecamatan Palibelo cukup memadai karena implementor program PUGaR merupakan lulusan Sarjana Perikanan, disamping itu implementor telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas bimbingan teknik dan sosialisasi mengenai Program PUGaR yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 3) Komunikasi badan pelaksana, komunikasi yang terjalin antara Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai implementor dengan pihak yang terkait dengan program PUGaR berjalan dengan baik. Dengan komunikasi yang baik akan membangun koordinasi yang baik pula sehingga dalam implementasi suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik pula. 4) Karakteristik badan

pelaksana, Dinas Kelautan dan Perikanan sangat intensif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dengan mendatangkan ahli/insinyur terkait garam dan mengikut sertakan perwakilan dari kelompok untuk melakukan studi banding ke Madura guna melihat dan bertanya secara langsung proses pembuatan garam semi intensif. 5). Sifat pelaksana, anggota kelompok sangat antusias dalam menerima program PUGaR, hal ini dikarenakan dari sikap yang dimiliki oleh implementor yang sangat terbuka dan demokrasi membuat anggota kelompok semangat untuk meningkatkan produksi garam mereka sesuai dengan standar dari program PUGaR tersebut. 6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses implementasi program PUGaR di Kecamatan Palibelo. Dibuktikan dengan antusiasnya anggota kelompok dalam mendukung implementasi program PUGaR tahun 2020. Walaupun ada beberapa pengaruh politik, namun dapat cepat terselesaikannya dengan adanya sosialisasi, musyawarah dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang tergabung dalam organisasi pelaksana program PUGaR tahun 2020.

Berdasarkan kesimpulan penulis, untuk Implementasi Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2020, maka saran dari penulis kepada pemerintah Kabupaten Bima, yaitu:

1. Sosialisasi bagi petambak garam dengan melakukan kegiatan yang

masuk dalam Bidang Kelembagaan dan Investasi harus dilakukan pada setiap desa sentra produksi garam di Kabupaten Bima. Karena kegiatan tersebut dapat membantu agar petambak garam lebih memahami tentang Program PUGaR dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat.

2. Perlunya koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dengan stake holder terkait dalam rangka Implementasi Program PUGaR di Kab. Bima pada umumnya dan di Kecamatan Palibelo pada khususnya.
3. Pemerintah dapat membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima terkait anggaran dengan mengalokasi anggaran untuk Implementasi Program PUGaR di Kabupaten Bima.

DAFTAR PUSTAKA

Anggleni, Andela. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang*. STIA Satya Negara Palembang: Palembang

Adhar. 2011. *Implementasi Peraturan Daerah No 06 Tahun 2001 Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Bima*. STISIP Mbojo Bima: Kota Bima

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak

Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Reepublik Indonesia. 2013. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam*. Jakarta. Dirjen PRL KKP-RI

_____. 2019. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam*. Jakarta. Dirjen PRL KKP-RI

_____. 2020. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam*. Jakarta. Dirjen PRL KKP-RI

Eri, Berlian. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press

Hidayah, Pepy Novia. 2012. *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Taktakan Kota Serang*. Serang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Jubaidah, 2011. *Implementasi Kebijakan Program Beras Masyarakat Miskin Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima*. STISIP Mbojo Bima: Kota Bima.

Karmanis,dkk. 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik. Buku Pedoman Belajar*. Semarang: Pilar Nusantara Semarang

Kurhayadi, dkk. 2020. *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*. Solok: Insan Cendikia Mandiri

- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Ryant Dwijowijoko. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Priono, Bambang dan Sinansari, Shofihar. 2020. *Peran Gender Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan*. Media Pustaka ; yogyakarta
- Rahmawati, A. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*. Makasar. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar
- Sari, Y, R. 2013. *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2011-2013*. Semarang: Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2017. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Suyanto., Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Usman, Ahmad, 2008. *Mari Belajar Meneliti*. Genta Press. Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solichim. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik : Konsep Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi*. Mandar: Mandar Maju
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik Dilingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.41/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

Internet

Akib. 2010. *Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No.1 tahun 2010.* [diakses 20 April 2021]

Alyas, dkk. 2017. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros).* Jurnal Sosiohumaniora. Volume 19 No 2 Juli 2017. [http://jurnal.unpad.ac.id>view>pdf](http://jurnal.unpad.ac.id/view>pdf) [diakses 06 Mei 2021]

Citradi, Tirta.2020. *Punya Laut Luas. RI Kok Mabuk Garam Impor?.* . <https://cnbcindonesia.com/new/202011313134512-4-129577/punya-laut-luas-ri-kok->

mabuk-garam-import. [diakses 20 Desember 2020]

Feis, Imronah. 2009. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Modek dan Kriteria Pengukurannya.* <https://www.neliti.com>. [diakses 17 Mei 2021]

Mudassir, Rayfal. 2021. *Kemenko Marves Targetkan Produksi Garam Nasional 3,1 Juta Ton pada Tahun 2021.* <https://www.bisnis.com>. [diakses 13 Februari 2021]

Riadi. 2020. *Pengembangan Usaha (Pengertian, Jenis, Strategi dan Tahapan).* <https://kajianpustaka.com>. [diakses 06 Mei 2021]

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2020. *Tindaklanjuti Arahan Presiden, Menperin Susun Strategi Peningkatan Produktivitas Garam Rakyat.* <https://setkab.go.id/tindaklanjuti-arahan-presiden-menperin-susun-strategi-peningkatan-produktivitas-garam-rakyat/>. [diakses 20 Desember 2020]

Sicca, Shintaloka Pradita. 2018. *Pemerintah Targetkan Integrasi Lahan Petambak Garam 1.200 Hektare.* <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-integrasi-lahan-petambak-garam-1200-hektare-cEcW>. [20 Desember 2020]

Sosiologis. 2018. *Jenis Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method.* <https://sosilogis.com/jenis-metodelogi-penelitian/>. [09 Februari 2021]

